

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anjayani, Eni, *Desaku Masa Depan*, (Klaten: Cempaka Putih, 2007)
- Antonius Simanjuntak, Bungaran, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013)
- Djaenuri, H. M. Aries, *Kepemimpinan, Etika dan Kebijakan Pemerintahan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015)
- H, Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1992)
- Hartoyo dkk, *Buku Materi Pokok: Pembangunan Masyarakat Desa*, (Universitas Terbuka, Karunika Jakarta, 1986)
- Kansil, C.S.T, *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, *Desa*, (Yogyakarta: PN Balai Pusaka, 1984)
- Kusnaedi, *Membangun Desa*, (Jakarta: SWADAYA, 1995)
- L.H., Fitriani, *Membangun Desa Idaman*, (Klaten: Saka MITRA Kompetensi, 2011)
- Marbun, BN, *Proses Pembangunan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 1980)
- Ndraha, Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991)
- , *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1982)
- Sadirwo, Daeng, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Angkasa, 1991)
- Siagian, H., *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: ALUMNI, 1983)
- Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009)

- Simandjuntak, B. dan I.L. Pasaribu, *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*, (Bandung: TARSITO, 1986)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004)
- Solekhan, Moch., *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang; Setara Press, 2014)
- Soeparmo, R., *Mengenal Desa Gerak dan Pengelolaannya*, (Tuban: PT Intermasa, 1977)
- Sukriono, Didik, *Hukum , Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Sumaryadi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Citra Utama, 2005)
- Suryaningrat, Bayu, *Pemerintahan dan Administrasi Desa*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018)
- Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1983)
- Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir, *Administrasi Pemerintahan Desa*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014)
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum, Konsep, dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013)

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2011) Cetakan Kesepuluh.
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014)

- Pemerintah Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2015)
- Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014)
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094, (Jakarta: Biro Hukum Kemendagri, 2014)
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, (Jakarta: Biro Hukum Kemendagri, 2015)
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 (Jakarta: Biro Hukum Kemendagri, 2018)
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28, (Banjarnegara: Sekretariat Daerah Kabupaten, 2018)
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 40, (Banjarnegara: Sekretariat Daerah Kabupaten, 2017)
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 7, (Banjarnegara: Sekretariat Daerah Kabupaten, 2017)
- Pemerintah Desa Pagerpelah, Peraturan Desa Pagerpelah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Lembaran Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 02, (Pagerpelah: Sekretariat Desa Pagerpelah, 2017)

Pemerintah Desa Pagerpelah, Peraturan Desa Pagerpelah Nomor Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaran Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 03, (Pagerpelah: Sekretariat Desa Pagerpelah, 2018)

Pemerintah Desa Pagerpelah, Peraturan Desa Pagerpelah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagerpelah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2018, Lembaran Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 05, (Pagerpelah: Sekretariat Desa Pagerpelah, 2018)

Pemerintah Desa Pagerpelah, Peraturan Desa Pagerpelah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagerpelah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018, Lembaran Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 06, (Pagerpelah: Sekretariat Desa Pagerpelah, 2018)

Pemerintah Desa Pagerpelah, Peraturan Desa Pagerpelah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2024, Lembaran Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 08, (Pagerpelah: Sekretariat Desa Pagerpelah, 2018)

Pemerintah Desa Pagerpelah, Peraturan Desa Pagerpelah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 09, (Pagerpelah: Sekretariat Desa Pagerpelah, 2018)

Pemerintah Desa Pagerpelah, Peraturan Desa Pagerpelah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018, Lembaran Desa Pagerpelah Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 01, (Pagerpelah: Sekretariat Desa Pagerpelah, 2019)

3. Jurnal

Ahadya, Neisa Nurrahma, *Tugas Kepala Desa Lerep dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, *Diponegoro Law Jurnal*, (Volume 6, Nomer 3, Tahun 2017), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19684/18646>, diakses pada 30 Oktober 2018.

Saraswati, Retno, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Kedepan (Ius Constituendum)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Volume 43 Nomor 3 Tahun 2014), <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/8941/7262>, diakses pada 25 Januari 2019.

Suwandi dan Dewi Rostyaningsih, *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Surakarta Suranenggala Kabupaten Cirebon*, *Journal of Public Policy and Management Review*, (Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/1318/1339>, diakses pada 11 Des 2018.

Yarni, Meri, *Menuju Desa yang Maju, Kuat, Mandiri, dan Demokratis Melalui Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa*, Unja, Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, (Volume 7 No 2 Mei 2016), <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2057>, diakses pada 30 Juni 2018.

4. Internet

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia, <http://www.kemendes.go.id/#>, diakses pada 22 Januari 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada 19 Oktober 2018.